

PERAN CSR, UKURAN PERUSAHAAN, KARAKTER EKSEKUTIF DAN KONEKSI POLITIK TERHADAP POTENSI TAX AVOIDANCE

Mamlu Atul Munawaroh¹, Ramdany²

¹STIE Muhammadiyah Jakarta, mamluatul96@gmail.com

²STIE Muhammadiyah Jakarta, ramdany2012@gmail.com

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif dan Koneksi Politik terhadap Potensi *Tax Avoidance*. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan konglomerasi yang terdaftar di BEI tahun 2014- 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode *purposive sampling* sebanyak 42 perusahaan konglomerasi tahun 2014-2018. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi *tax avoidance*. *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, dan Karakter Eksekutif bukan merupakan faktor penentu potensi *tax avoidance*.

Kata Kunci: *Tax Avoidance*, *Corporate Social Responsibility*, Ukuran Perusahaan, Karakter Eksekutif, Koneksi Politik

ABSTRACT

The purpose of this research is to test the influence of corporate social responsibility, firm size, character executive and connections political about the potential of tax avoidance. The population in this research is a conglomerate company listed on the Indonesia Stock Exchange from 2014 to 2018. Sampling using the Purposive sampling method as much as 42 conglomerate companies in 2014-2018. The analytical techniques used in this study are multiple linear regression analyses. The results of the analysis showed that political connections were significantly positive against the potential tax avoidance. While Corporate Social Responsibility, corporate size, executive character are not determine the potential of tax avoidance.

Keywords: *Tax Avoidance, Corporate Social Responsibility, firm size, executive character, political connection*

PENDAHULUAN

Praktik penghindaran pajak merupakan salah satu strategi perusahaan untuk memitigasi beban pajak secara legal dengan memanfaatkan celah atas ketentuan peraturan perpajakan. Fenomena terkait praktik penghindaran pajak telah dikenal sejak dahulu yaitu ketika peraturan mengenai ketentuan perpajakan dikeluarkan (Uadiale *et al*, 2010). Fenomena ini cenderung terjadi pada wajib pajak badan karena terkait dengan besaran laba yang diperoleh yang akan mempengaruhi besaran pajak yang dibayarkan oleh wajib pajak badan.

Target penerimaan perpajakan pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan dengan APBN 2018 sebesar Rp1.618,1 triliun menjadi Rp1.540,8 triliun. Tidak tercapainya target ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor dimana salah satunya karena adanya tindakan pengelolaan beban perpajakan oleh perusahaan. Tindakan pengelolaan beban pajak merupakan akibat adanya kepentingan yang berbeda antara perusahaan dan pemerintah. Upaya ini dalam rangka untuk meminimalisasi besarnya pajak dengan tidak menunjukkan keuntungan yang sesungguhnya (Mughal *et al*, 2012).

Salah satu pengelolaan beban pajak yang dapat diterapkan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang ada adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dapat diterima fiskus (Hardianti, 2014). Fenomena tersebut menjadi pertentangan antara pemerintah dengan perusahaan yakni pemerintah ingin memaksimalkan penerimaan pajak dari perusahaan sedangkan perusahaan ingin meminimalkan beban pajaknya. Terdapat beberapa kasus yang melakukan penghindaran pajak, salah satunya seperti PT. Adaro Tbk yang melakukan penghindaran pajak dengan cara melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, *Coaltrade Services International*. Upaya tersebut telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Adaro diduga telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak US\$ 125 juta atau setara Rp 1,75 triliun (kurs Rp 14 ribu) lebih rendah daripada yang seharusnya dibayarkan di Indonesia (Sugianto, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengaitkan tingkat pengungkapan CSR terhadap *Tax Avoidance* dan didapatkan hasil penelitian yang berbeda. Menurut Ajeng dkk (2017) dan Dwilopa (2016) menyatakan bahwa *Corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Dharma dan Noviani (2017) dan Pradipta (2015) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR yang dilakukan suatu perusahaan akan menurunkan praktik penghindaran pajak. Wiguna dan Jati (2017) dan Hidayati dan Fidiana (2017) menyatakan bahwa CSR berpengaruh positif pada penghindaran pajak. Semakin tinggi perusahaan mengungkapkan CSR, maka semakin tinggi tindakan penghindaran pajak perusahaan.

Ukuran perusahaan juga dapat digunakan untuk mendeteksi penghindaran pajak. Bauran aset yang dimiliki oleh perusahaan juga dapat berpengaruh terhadap kesempatan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Ukuran perusahaan menunjukkan kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya. Semakin besar ukuran suatu perusahaan maka semakin menjadi pusat perhatian dari pemerintah dan akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku patuh (*compliances*) atau agresif (*tax avoidance*) dalam perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013).

Menurut Taufik dan Hani (2017) dan Dewi dan Wijaya (2013) menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Dewi dan Naniek (2017) dan Oktamawati (2017) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh secara negatif pada penghindaran pajak, yaitu semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin rendah perusahaan melakukan penghindaran pajak. Menurut Dharma (2015) dan Dewinta, dkk (2016) menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan *tax avoidance* akan tinggi.

Penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut tentulah melibatkan pimpinan perusahaan didalamnya sebagai pengambil keputusan. Pimpinan

perusahaan tersebut tentu saja memiliki karakter yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya. Mungkin sulit dibayangkan bagaimana bisa pimpinan eksekutif suatu perusahaan mempengaruhi *tax avoidance*. Namun pada kenyataannya *Chief Executive Officer* (CEO) dapat mempengaruhi keputusan penghindaran pajak dengan mengatur “*tone at the top*” berkaitan dengan kegiatan pajak perusahaan (Dyrenge et al, 2010). Menurut Oktamawati (2017) dan Maharani & Suardana (2014), karakteristik eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi *risk* maka semakin tinggi *tax avoidance*. Menurut Praptidewi, dkk (2016) karakteristik eksekutif yang diprosikan melalui risiko perusahaan cenderung bersifat *risk averse* berpengaruh negatif pada *tax avoidance* perusahaan.

Selain faktor- faktor seperti CSR, ukuran perusahaan dan karakter eksekutif yang mempengaruhi praktik penghindaran pajak, terdapat juga koneksi politik yang merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penghindaran pajak. Dunia bisnis sangat erat kaitannya dengan politik, hal ini disebabkan karena berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Wati, 2017). Disatu sisi, koneksi politik bernilai bagi perusahaan. Wati (2017), Maulana dan Wati (2019) memberikan bukti empiris bahwa koneksi politik mampu meningkatkan kinerja perusahaan baik jangka pendek maupun jangka panjang, namun disisi lain, koneksi politik di perusahaan juga dapat meningkatkan *tax avoidance* (Butje & Tjondro, 2014). Dharma dan Noviani (2015) serta Annisa (2017) mengungkapkan bahwa koneksi politik tidak berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Tehupuring (2016) meneliti hal yang sama mengenai pengaruh koneksi politik dan hasilnya menyatakan bahwa koneksi politik berpengaruh negatif terhadap penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian-penelitian terdahulu masih menghasilkan banyak perbedaan, maka perlu dilakukan penelitian kembali tentang pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap potensi *tax avoidance* di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menemukan bukti secara empiris mengenai pengaruh *Corporate Social Responsibility*, ukuran perusahaan, karakter eksekutif dan koneksi politik terhadap potensi *tax avoidance* secara komprehensif.

KAJIAN LITERATUR

Teori Agensi

Dalam teori keagenan menjelaskan tentang dua pelaku ekonomi yang saling bertentangan yaitu prinsipal dan agen. Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Ichsan, 2013). Teori agensi merupakan problem keagenan antara pemegang saham (pemilik perusahaan) dengan manajer potensial yang terjadi apabila manajemen tidak memiliki saham mayoritas perusahaan. Pemegang saham menginginkan manajer bekerja dengan tujuan memaksimumkan kemakmuran pemegang saham. Sebaliknya, manajer perusahaan bisa saja bertindak tidak untuk memaksimumkan kemakmuran pemegang saham, tetapi memaksimumkan kemakmuran mereka sendiri.

Tax Avoidance

Menurut Hanlon *et al.* (2010) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai pengurangan jumlah pajak eksplisit, dimana *tax avoidance* merupakan rangkaian aktivitas perencanaan pajak. Penghindaran pajak juga dapat dilakukan secara illegal yang disebut sebagai *tax evasion* atau dapat juga dianggap sebagai penggelapan pajak, yaitu melakukan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan dalam peraturan perundang- undangan perpajakan.

Penelitian ini menggunakan rumus:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

(Hanlon & Heitzman, 2010)

Corporate Social Responsibility

Sebuah perusahaan selalu mengupayakan sejenis legitimasi dari masyarakat dengan cara melakukan aktivitas tanggung jawab sosial atau yang sering disebut sebagai *corporate social responsibility*. Menurut Hoi, *et al* (2013) *corporate social responsibility* adalah keyakinan tentang tindakan-tindakan yang dianggap benar yang mempertimbangkan tidak hanya masalah ekonomi tetapi juga masalah sosial, lingkungan dan dampak eskternalitas lain dari tindakan-tindakan perusahaan. Didukung oleh Wati d.k.k (2019), *Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan sebuah gagasan yang tidak lagi dihadapkan pada tanggung jawab yang berpijak pada *single bottom line saja*, tetapi juga berpijak pada *triple bottom line* yaitu tanggung jawab terhadap masalah sosial dan lingkungan.

Corporate social responsibility merupakan suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup (Rahman, 2009). Sebagai contoh, perusahaan membuat produk yang ramah lingkungan bagi pelanggannya, memberikan beasiswa kepada keluarga pegawai, melakukan pengembangan komunitas masyarakat sekitar operasional perusahaan, dan menghindari kerusakan lingkungan akibat operasional perusahaan.

Penelitian ini menggunakan rumus:

$$CSRDi = \frac{\sum xi}{n}$$

(Wati d.k.k., 2019)

Ukuran Perusahaan

Ukuran secara umum dapat diartikan sebagai suatu perbandingan besar atau kecilnya suatu objek. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, ukuran diartikan sebagai berikut:

1. Alat untuk mengukur (seperti meter, jangka dan sebagainya)
2. Sesuatu yang dipakai untuk menentukan,
3. Pendapatan mengukur, dan
4. Panjangnya (lebarnya, luasnya, besarnya) sesuatu.

Ukuran perusahaan adalah sebagai ukuran perusahaan merupakan nilai yang menunjukkan besar/kecilnya perusahaan. Dewi & Wijaya (2013) mengemukakan bahwa pengukuran variabel ukuran perusahaan berdasarkan total aktiva. Menurut Jogiyanto (2007:282) ukuran aktiva digunakan untuk mengukur besarnya perusahaan, ukuran aktiva tersebut diukur sebagai logaritma dari total aktiva. Nilai total asset biasanya bernilai sangat besar dibandingkan dengan variabel keuangan lainnya, untuk itu *variable asset* diperhalus menjadi Log Asset atau Ln Total Asset.

penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Ukuran perusahaan} = \text{Log (Total Aset)}$$

(Wati d.k.k., 2019)

Karakter Eksekutif

Menurut Low (2006) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang berani mengambil keputusan bisnisnya.

Sedangkan Eksekutif yang mempunyai sifat *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani mengambil keputusan bisnisnya. Risiko perusahaan (*corporate risk*) adalah cerminan kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan. Kebijakan yang diambil pimpinan perusahaan dapat mengindikasikan apakah pimpinan mempunyai karakter *risk taker* atau *risk averse*.

Jenis karakter eksekutif yang duduk dalam manajemen perusahaan apakah mereka merupakan *risk taker* atau *risk averse* dapat tercermin pada besar kecilnya risiko perusahaan yang ada. Risiko perusahaan merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pemimpin perusahaan. Jadi *policy* yang diambil ini mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse* (Coles et al, 2004 dalam Rusli, 2014). Dapat diartikan bahwa semakin tinggi risiko perusahaan yang ada, maka pemimpin perusahaan semakin memiliki karakter *risk taker* yang akan membuat keputusan untuk melakukan tindakan penghindaran pajak.

Penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Risiko perusahaan} = \frac{\text{EBIT}}{\text{Total Aktiva}}$$

(Haryanto, 2012)

Koneksi Politik

Koneksi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) tahun 2008 adalah hubungan yang dapat memudahkan segala urusan (kegiatan), sedangkan politik adalah pengetahuan tentang ketatanegaraan atau kenegaraan (seperti tata sistem pemerintahan, dasar pemerintahan).

Berhasilnya suatu bisnis tidak terlepas dari adanya pengaruh politik. Perusahaan dikatakan terkoneksi politik apabila perusahaan dengan cara-cara tertentu memiliki keterikatan secara politik atau berusaha menjalin hubungan kedekatan dengan politisi atau pemerintah (Wati et. al., 2017). Hubungan antara pengusaha- pengusaha di Indonesia terjadi dengan munculnya pengusaha klien, yaitu pengusaha-pengusaha swasta pribumi yang beroperasi di bawah dukungan dan proteksi berbagai jaringan kekuasaan pemerintahan.

Perusahaan yang mempunyai koneksi politik adalah perusahaan atau konglomerat yang mempunyai hubungan dekat dengan pemerintah. Pengukuran variabel ini menggunakan dummy seperti yang digunakan oleh Wati et. al. (2017), angka 1 untuk mengindikasikan perusahaan yang mempunyai koneksi politik dan angka 0 untuk mengindikasikan perusahaan yang tidak mempunyai koneksi politik. Kriteria yang digunakan untuk mendefinisikan *political connection* mengacu kepada penelitian yang dilakukan oleh Faccio (2006), Wati et. al. (2017), yaitu:

- a. jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan anggota DPR, anggota kabinet eksekutif, pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer, atau anggota partai politik,
- b. jika ada salah satu direktur atau komisaris yang juga merupakan mantan anggota DPR, mantan anggota kabinet eksekutif, mantan pejabat dalam salah satu institusi pemerintah termasuk militer,
- c. jika ada salah satu pemilik/pemegang saham diatas 10% merupakan anggota partai politik, memiliki hubungan dengan politisi top, dan/atau pejabat atau mantan pejabat pemerintah termasuk militer.

Variabel Kontrol

Firm Age

Umur perusahaan adalah lamanya perusahaan berdiri. Seiring waktu, perusahaan belajar untuk semakin baik dan lebih efisien serta memiliki keunggulan kompetitif dalam inti bisnisnya dan mendorong keberhasilan dan kemakmuran organisasi.

Penelitian ini menggunakan rumus:

$$\text{Umur perusahaan} = \text{Tahun annual report} - \text{Tahun berdiri}$$

Profitabilitas

Rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan dari kegiatan bisnis yang dilakukan. Hasilnya, investor dapat melihat seberapa efisien perusahaan menggunakan asset dan dalam melakukan operasinya untuk menghasilkan keuntungan. Rasio profitabilitas merupakan hasil akhir dari sejumlah kebijakan dan keputusan yang dilakukan oleh perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan proksi *Return On Asset* (ROA).

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Aset}}$$

Pengembangan Hipotesis

Sebuah perusahaan dituntut dapat melakukan tanggung jawab atas segala aktivitasnya kepada *stakeholder*, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab sosial atau sering disebut *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR adalah suatu komitmen bisnis untuk berkontribusi dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan, bekerja dengan karyawan perusahaan, keluarga karyawan tersebut, berikut komunitas setempat (lokal) dan masyarakat secara keseluruhan dalam rangka memperbaiki kualitas hidup (Rahman, 2009).

Lanis dan Richardson (2012) melakukan penelitian untuk mengetahui apakah pendekatan perusahaan untuk CSR berhubungan dengan tingkat penghindaran pajak. Penghindaran pajak diprosikan dengan ETR (*Effective Tax Rates*), hasil penelitian yang ditemukan menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat pengungkapan CSR dari suatu perusahaan, semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan tersebut. Hasil penelitian ini sama dengan hasil penelitian dari Muzakki & Darsono (2015), Dharma & Noviani (2017) dan Khoirunnisa (2017).

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah :

H₁: Corporate Social Responsibility berpengaruh negatif terhadap potensi tax avoidance

Ukuran perusahaan adalah suatu skala dimana dapat diklasifikasikan besar kecil perusahaan menurut beberapa cara, antara lain : total aset, penjualan bersih dan kapitalisasi pasar. Perusahaan yang memiliki total aktiva besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Sehingga perusahaan yang diklasifikasikan sebagai perusahaan besar cenderung meminimalkan tindakan pajak agresif karena ketatnya pengawasan oleh otoritas publik (Tandean, 2014). Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh *agent* untuk memaksimalkan kompensasi kinerja *agent*, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Dharma (2015), Dewinta (2016), Singly & Sukartha (2015), Oktamawati (2017) dan Ngadiman & Puspitasari (2014) menemukan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi *tax avoidance*. Hal ini berarti bahwa semakin tinggi ukuran perusahaan maka tindakan potensi *tax avoidance* akan semakin tinggi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₂: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap potensi tax avoidance

Menurut Low (2006) dalam melaksanakan kewajibannya sebagai pimpinan perusahaan eksekutif mempunyai dua karakter yaitu sebagai *risk taker* dan *risk averse*. Eksekutif yang mempunyai sifat *risk taker* merupakan eksekutif yang memiliki kelebihan yang berani dalam pengambilan keputusan bisnisnya. Sedangkan eksekutif yang mempunyai karakter *risk averse* merupakan eksekutif yang tidak berani dalam pengambilan keputusan bisnisnya.

Risiko perusahaan menggambarkan perilaku menyimpang. Tipe manajer *risk taker* umumnya memiliki keinginan dapat mendatangkan arus kas yang besar untuk memenuhi tujuan pemilik perusahaan agar mendapat arus kas dari operasi perusahaan. Arus kas yang tinggi akan

didapatkan dari aktivitas *tax avoidance* dengan memperbesar *tax saving*. Oleh karena itu manajemen dengan karakter *risk taker* akan berupaya menaikkan pendapatan perusahaan.

Penelitian ini juga dilakukan oleh Oktamawati (2017), Swingly & Sukartha (2015), Oktamawati (2017), Wiguna & Jati (2017) dan Maharani dan Suardana (2014) menemukan bahwa Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Hal ini menunjukkan bahwa karakter eksekutif yang memiliki sifat *risk taker* maka semakin tinggi potensi *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₃: Karakter eksekutif berpengaruh positif terhadap potensi *tax avoidance*

Memiliki koneksi politik membuat perusahaan memperoleh perlakuan khusus, seperti kemudahan dalam memperoleh pinjaman modal, resiko pemeriksaan pajak rendah yang membuat perusahaan makin agresif dalam menerapkan *tax planning* yang berakibat pada menurunnya transparansi laporan keuangan. Kehilangan investor akibat penurunan transparansi laporan keuangan dapat digantikan dengan peran pemerintah sebagai penyandang dana utama. Selain itu, perusahaan yang memiliki koneksi dengan pemerintah yang sedang berkuasa terbukti memiliki tingkat *tax avoidance* yang signifikan tinggi jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis yang tidak memiliki koneksi politik (Francis *et al.*, 2012; Kim dan Zhang, 2013).

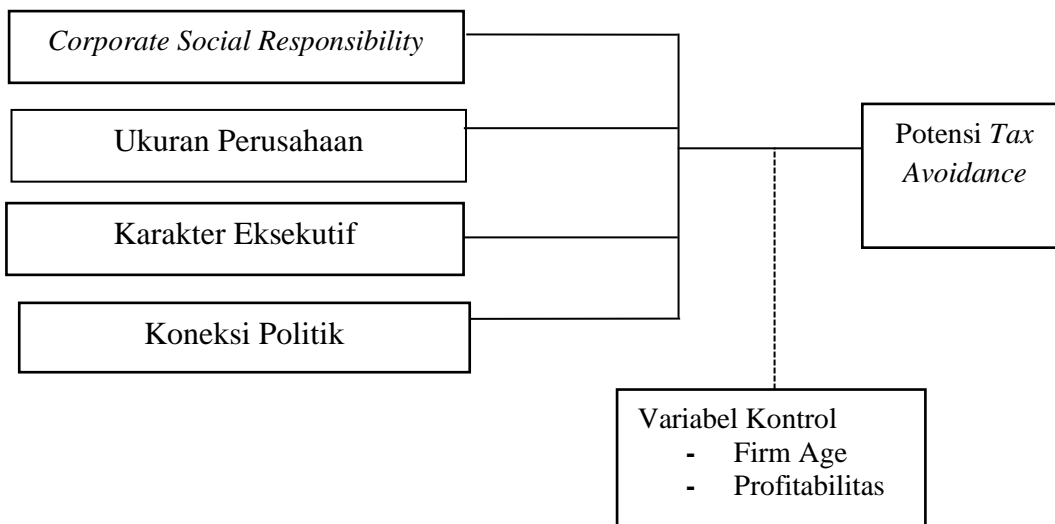
Penelitian yang dilakukan Butje & Tjondro (2014), Sudibyo & Jianfu (2016), Adhikari, *et al* (2015) dan Lestari, dkk (2017) menunjukkan bahwa koneksi politik berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Semakin tinggi tingkat koneksi politik suatu perusahaan, maka semakin tinggi potensi *tax avoidance* yang terjadi.

Berdasarkan uraian tersebut, maka hipotesis yang diajukan adalah:

H₄: Koneksi politik berpengaruh positif terhadap potensi *tax avoidance*

Kerangka Pikir dan Hipotesis

Berdasarkan uraian di atas, dapat dibuat suatu kerangka pemikiran teoritis yang menggambarkan variabel-variabel yang mempengaruhi potensi penghindaran pajak yaitu:



Gambar 1. Kerangka Pikir

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan konglomerasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dan yang memberikan informasi laporan keuangan pada situs resminya di www.idx.co.id. Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan konglomerasi

yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2014-2018, menggunakan metode *purposive sampling*.

Tabel 1. Hasil Penentuan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan konglomerasi yang terdaftar di BEI	86
Perusahaan konglomerasi dengan <i>annual report</i> tidak lengkap dari tahun 2014- 2018	(6)
Perusahaan konglomerasi yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2014- 2018	(14)
Perusahaan konglomerasi yang mengalami kerugian pada periode 2014-2018	(24)
Jumlah sampel	42

Sumber : Data diolah, 2019

Dalam penelitian ini dapat dibentuk persamaan :

Model 1

$$PTA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 UKP + \beta_3 KE + \beta_4 KP + \beta_5 age + \beta_6 profit + \varepsilon$$

Model 2 (Robust test)

$$PTA = \alpha + \beta_1 CSR + \beta_2 UKP + \beta_3 KE + \beta_4 KP + \varepsilon$$

Dimana:

PTA =Potensi Penghindaran pajak (*Tax Avoidance*)

α = Nilai konstan (alpha)

β = Koefisien regresi

CSR= *Corporate Social Reponsibility*

UKP= Ukuran Perusahaan

KE= Karakter Eksekutif

KP= Koneksi Politik

Age= Umur perusahaan (variabel kontrol)

Profit= profitabilitas (variabel kontrol)

Dasar pengujian hipotesis menggunakan perbandingan ttabel dengan tsatistik atau p-value (Wati, 2018). Jika P-value < 0,05 maka hipotesis penelitian diterima.

ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Tabel 2
Deskripsi Variabel Penelitian

N = 210	Minimum	Maximum	Median	Mean	Std. Deviasi
CSR	0.24050	0.75950	0.49370	0.48794	0.13163
<i>Size</i>	5.98200	9.11290	7.27110	7.40309	0.68327
Kar. Eksekutif	0.00490	0.85980	0.11055	0.14556	0.13564
Kon. Politik	0.00000	1.00000	1.00000	0.80952	0.39362
<i>Tax Avoidance</i>	0.01220	1.20960	0.24170	0.23945	0.14814

Sumber: Data diolah, 2019

Variabel *tax avoidance* yang dihitung dengan ETR memiliki rata- rata sebesar 0,239, nilai terendah (*minimum*) sebesar 0,012 pada PT. Lippo Cikarang Tbk tahun 2018 , nilai tertinggi (*maximum*) 1,21 pada PT. Japfa Comfeed Indonesia Tbk tahun 2017 dan standar

deviasi sebesar 0,148. Variabel *corporate social responsibility* memiliki rata-rata sebesar 0,488, nilai terendah sebesar 0,241 pada PT. Gudang Garam Tbk tahun 2014- 2015 dan PT. Lautan Luas Tbk tahun 2014- 2016 , nilai tertinggi 0,76 pada PT. Bukit Asam Tbk tahun 2016- 2018 dan standar deviasi sebesar 0,132. Variabel ukuran perusahaan memiliki rata-rata sebesar 7,403, nilai terendah sebesar 5,982 pada PT. Radiant Utama Interinsco Tbk tahun 2017 , nilai tertinggi 9,113 pada PT. Bank Rakyat Indonesia tahun 2018 dan standar deviasi sebesar 0,683. Variabel karakter eksekutif yang dihitung dengan nilai risiko perusahaan memiliki rata-rata sebesar 0,146, nilai terendah sebesar 0,005 pada PT. Jakarta International Hotels & Development Tbk tahun 2015, nilai tertinggi 0,86 pada PT. Unilever Indonesia Tbk tahun 2014 dan standar deviasi sebesar 0,136. Koneksi politik yang menggunakan variabel *dummy* yang nilainya hanya 1 dan 0, sehingga nilai terendah adalah 0, nilai tertinggi 1, nilai rata-rata sebesar 0,81 dan standar deviasi sebesar 0,394.

Tabel 3
Hasil Pengujian Model Penelitian
Hasil Regresi *Random Effect Model*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0.258244	0.186045	1.388076	0.1666
CSR	0.165085	0.129234	1.277415	0.2029
SIZE	-0.023167	0.026448	-0.875932	0.3821
KE	0.006935	0.140723	0.049280	0.9607
KP	0.081837	0.032568	2.512828	0.0128
AGE	0.000537	0.000725	0.740080	0.4601
PROFIT	-0.274830	0.254836	-1.078458	0.2821

Sumber: *Eviews*, data diolah, 2019

Berdasarkan hasil uji t, *corporate social responsibility* memiliki t hitung sebesar 1,277415 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,2029. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($1,277415 < 2,0244$) dengan nilai signifikansi ($0,2029 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap potensi *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Ajeng, dkk (2017) dan Dwilopa (2016) yang sama-sama menemukan bahwa *corporate social responsibility* tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap potensi *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan memiliki t hitung sebesar -0,875932 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,3821. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($-0,875932 < 2,0244$) dengan nilai signifikansi ($0,3821 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap potensi *tax avoidance*. Hasil ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Taufik dan Hanif (2017), Tandean (2014) dan Dewi dan Naniek (2017). Hal ini menunjukkan bahwa besar kecilnya ukuran suatu perusahaan tidak berpengaruh Karakter Eksekutif memiliki t hitung sebesar 0,049280 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,9607. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih kecil daripada t tabel ($0,049280 < 2,0244$) dengan nilai signifikansi ($0,9607 > 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap potensi *tax avoidance*. Hasil pengujian terhadap hipotesis ditolak. Hasil ini didukung oleh peneliti sebelumnya yaitu Gartika dan Wijaya (2018) yang mengatakan bahwa semakin tinggi karakter eksekutif semakin rendah tingkat penghindaran pajaknya.pemimpin perusahaan yang sudah lama memegang jabatan dan berusia lebih tua lebih cenderung menghindari risiko besar yang mengakibatkan perusahaan dipandang buruk oleh reaksi pasar.

Koneksi politik memiliki t hitung sebesar 2,512828 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,0128. Hal ini menunjukkan bahwa t hitung lebih besar daripada t tabel ($2,512828 > 2,0244$)

dengan nilai signifikansi ($0,0128 < 0,05$). Sehingga dapat disimpulkan bahwa koneksi politik berpengaruh positif signifikan terhadap potensi *tax avoidance*. Hasil ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Butje & Tjondro (2014), Darminto (2014), Sudibyo & Jianfu (2016). Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang mayoritas dimiliki oleh orang-orang yang berkepentingan di pemerintahan memiliki pengaruh kuat untuk melakukan potensi *tax avoidance*.

PENUTUP

Secara empiris, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa factor yang menentukan penghindaran pajak pada perusahaan adalah koneksi politik. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan konglomerasi yang dipimpin oleh pemimpin yang berkepentingan dalam pemerintahan berpotensi untuk melakukan penghindaran pajak lebih tinggi. *Corporate social responsibility*, ukuran perusahaan dan karakter eksekutif bukanlah factor penentu dari penghindaran pajak pada perusahaan. Hal ini terjadi karena informasi CSR yang diungkapkan dalam laporan keuangan, belum tentu sesuai dengan kondisi sebenarnya. Sehingga tingkat pengungkapan kegiatan tanggung jawab social dalam laporan tahunan perusahaan tidak bisa dijadikan jaminan akan rendahnya tindakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan tidak mempengaruhi tindakan untuk melakukan penghindaran pajak. Karena perusahaan menganggap bahwa pajak yang dibayarkan adalah beban yang akan mengurangi laba yang diharapkan. Karakter eksekutif tidak berpengaruh terhadap potensi *tax avoidance*, menunjukkan bahwa pimpinan yang memiliki sifat *risk taker* maupun *risk averse* tidak mempengaruhi untuk melakukan penghindaran pajak pada perusahaan dan terdapat beberapa saran yang dapat dipertimbangkan untuk penelitian selanjutnya, seperti memperluas jumlah sampel penelitian dengan menggunakan perusahaan selain perusahaan yang masuk dalam kategori konglomerasi sehingga penelitian dapat digeneralisasikan dan mendapatkan hasil yang lebih valid, menambah variabel lain yang berpengaruh terhadap *tax avoidance* misalnya investor asing, dan kompensasi rugi fiskal dan memperpanjang periode pengamatan sehingga dapat menangkap volatilitas potensi *tax avoidance* lebih baik.

REFERENSI

- Ajeng, W., Anita, W., & Chomsatu, Y. (2017). Pengaruh Karakteristik Perusahaan, GCG Dan CSR. *Journal Of Economic And Economic Education Vol.5 No.2*, 113-127.
- Annisa. (2017). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan Dan Koneksi Politik Terhadap Penghindaran Pajak. *Faculty Of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 685-698.
- Butje, S., & Tjondro, E. (2014). Pengaruh Karakter Eksekutif Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Tax & Accounting Review, Vol 4, No 2*, 1-9.
- Dewi, A. S., & Wijaya, A. (2013). Pengaruh Struktur Modal, Profitabilitas Dan Ukuran Perusahaan Pada Nilai Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana. Bali*.
- Dewi, N. L., & Naniek, N. (2017). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas Dan Corporate Social Responsibility Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober*, 830-859.
- Dewinta, I. A., & Setiawan, P. E. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.14.3. Maret*, 1584-1613.
- Dharma, I. M. (2015). Pengaruh Leverage, Intensitas Aset Tetap, Ukuran Perusahaan, Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. In SKRIPSI. Denpasar: Universitas Udayana.

- Dharma, N. B., & Noviari, N. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Tax Avoidance. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.18.1. Januari*, 529-556.
- Dwilopa, D. E. (2016). *Pengaruh Corporate Social Responsibility, Capital Intensity, Dan Perencanaan Pajak Terhadap Penghindaran Pajak*. Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Dyrenge, S. D., Michelle, H., & Maydew, E. L. (2010). The Effect Of Executives On Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol. 85, 116-1189.
- Faccio, M. (2006). Politically Connected Firms. *The American Economic Review*, 96 (1), 369-386.
- Francis, B. B., Hasan, I., & Sun, X. (2012). CEO political affiliation and firms' tax avoidance. *Available at SSRN 2013248*.
- Gartika, R. W. (2018). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Dan Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ekonomi Vol 9 No. 1*, 70-79.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). Review Of Tax Research. *Journal Of Accounting And Economics 50*, 127 - 178.
- Hardianti, E. P. (2014). Analisis Tindakan Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Yang Mempunyai Koneksi Politik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 7-8.
- Haryanto, S. (2012). Karakteristik Perusahaan Dan Risiko Bisnis Terhadap Struktur Modal Pada Perusahaan Otomotif. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Vol. 16*.
- Hidayati, N., & Fidiana. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi Volume 6, Nomor 3, Maret*, 1953-1068.
- Hoi, C.-K., Wu, Q., & Zhang, H. (2013). Is Corporate Social Responsibility (CSR) Associated With Tax Avoidance ? *Evidence From Irresponsible CSR Activities. The Accounting Review. Vol. 88, No. 6*, 2025-2059.
- Ichsan, R. (2013, Januari 12). *Teori Keagenan*. Retrieved April 1, 2019, From <https://Bungrandhy.Wordpress.Com/2013/01/12/Teori-Keagenan-Agency-Theory/>
- Khoirunnisa, D. (2017). Kualitas Audit, Corporate Social Responsibility Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance.
- Kim, C., & Zhang, L. (2016). Corporate political connections and tax aggressiveness. *Contemporary Accounting Research*, 33(1), 78-114.
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2013). Pengaruh Return On Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi, Volume 18, No. 1, Februari Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi, Universitas Udayana*, 58-66.
- Low, A. (2006). Managerial Risk-Taking Behavior And Equity-Based Compensation. *Journal Of Financial Economics 92(3):* , 470-490.
- Maharani, I. G., & Suardana, K. A. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas Dan Karakteristik Eksekutif Pada Tax Avoidance Perusahaan Manufaktur. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 9.2*, 525-539.
- Maulana, & Wati, L.N. (2019). Peran Koneksi Politik dan Struktur Kepemilikan dalam Peningkatan Nilai Perusahaan. *Jurnal Akuntansi. Vol. 8 No. 1*. 1-13.

- Mughal, M. M., & Akram, M. (2012). Reasons Of Tax Avoidance And Tax Evasion. *Reflections From Pakistan. Journal Of Economics And Behavioral Studies*,, 217-222.
- Muzakki, & Darsono. (2015). Pengaruh Corporate Social Responsibility Dan Capital Intensity Terhadap Penghindaran Pajak.
- Ngadiman, & Puspitasari, C. (2014). Pengaruh Leverage, Kepemilikan Institusional, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Sektor Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2010-2012.
- Oktamawati, M. (2017). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, Dan Profitabilitas Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Bisnis, Vol. XV No. 30 Maret, Universitas Katolik Soegijapranata*, 126-143.
- Praptidewi, L. P., & Sukartha, I. M. (2016). Pengaruh Karakteristik Eksekutif Dan Kepemilikan Keluarga Pada Tax Avoidance Perusahaan. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.17.1. Oktober*, 426-452.
- Rahman, R. (2009.). *Corporate Social Responsibility : Antara Teori Dan Kenyataan*. Yogyakarta.: Media Pressindo.
- Rusli, R. (2014). *Skripsi: Pengaruh Karakter Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Dimensi Tata Kelola Perusahaan Dan Reformasi Perpajakan Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak*. Pekanbaru: Universitas Riau.
- Sudibyo, Y. A., & Jianfu, S. (2016). Political Connections, State Owned Enterprises And Tax Avoidance : An Evidence From Indonesia .
- Sugianto, D. (2019, Juli 5). *Detik Finance*. Retrieved Juli 27, 2019, From Detik Finance: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4612708/mengenal-soal-penghindaran-pajak-yang-dituduhkan-ke-adaro>
- Swingly, C., & Sukartha, M. (2015). Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, Leverage Dan Sales Growth Pada Tax Avoidance .
- Tandean, V. A. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. *Institut Bisnis Dan Informatika Kwik Kian Gie*.
- Tehupuring, R. (2016). Pengaruh Koneksi Politik Dan Kualitas Audit Terhadap Praktik Penhindaran Pajak Di Lembaga Perbankan Yang Terdaftar Di Pasar Modal Indonesia Periode 2012-2014. *Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC, Universitas Bakrie, Jakarta. 2-3 Mei*, 366-276.
- Uadiale, O. M., O., F. T., & Ogunleye, J. O. (2010). An Empirical Study Of The Relationship Between Culture And Personal Income Tax Evasion In Nigeria. *European Journal Of Economics, Finance And Administrative Science*, 116-126.
- Wati, L.N., Primiana, I. and Sudarsono, R. 2016. Political connections of conglomerates: evidence from Indonesia Stock Exchange. *Actual Problems of Economics*. (12), pp.110-119.
- Wati, L. N. 2017. Board of commissioner's effectiveness on politically connected conglomerates: Evidence from Indonesia. *Pertanika Journal Social Sciences & Humanities*, 25(S), pp. 255-270.
- Wati, L. N. (2018). *Metodologi Penelitian Terapan*. Jakarta: Pustaka Amri.
- Wati, L.N., Syahdam, G.R., Prambudi, B. (2019). Peran Pengungkapan CSR dan Mekanisme GCG Pada Kinerja Keuangan terhadap Nilai Perusahaan. *Ecodemica*. Vol. 3 No. 2. Pp. 98-110.

Wiguna, I. P., & Jati, I. K. (2017). Pengaruh Corporate Social Responsibility, Preferensi Risiko Eksekutif, Dan Capital Intensity Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol.21.1. Oktober*, 418-446.